

**ANALISIS PERAN BAGIAN HUMAS DALAM
MENINGKATKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT
PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

SIKRIPSI

OLEH:

RESTRAINT JUST SKB BAENE

188520155



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**ANALISIS PERAN BAGIAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN
INFORMASI KEPADA MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Restraint Just SKB Baene

NPM : 188520155

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Walid Mustafa Sembiring S. Sos, M.IP

Beltahmamero Simamora, S. IP, MPA

Mengetahui :

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik



Hasibuan, M.Si

Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

LEMBAR PERNYATAAN

Saya mengatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Ada pun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apa bila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Oktober 2022



188520155

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restraint just Skb Baene
NPM : 188520155
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2022



Restraint just skb Baene

188520155

ABSTRAK

ANALISIS PERAN BAGIAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan pada penelitian ini adalah masih belum menjalankan peran bagian Humas pemerintahan secara maksimal dan fasilitas yang belum semua tersedia pada bagian peralatan bagian humas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Peran humas menurut dozier&broom, 1995 yaitu: Penasehat ahli (*expert presciber*), Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*), Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*), dan Teknisi Komunikasi (*communication technician*). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Staf Humas. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah sangat bagus, setiap adanya masalah Pegawai berperan untuk mencari solusi dalam penyelesaian setiap masalah yang terjadi, staf pegawai selalu tepat waktu dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas tentang kegiatan-kegiatan Anggota Dewan, Menerima dan menyampaikan informasi yang diperlukan oleh Publik melalui website, Media sosial serta harus memiliki komunikasi yang baik juga untuk memberikan atau meningkatkan informasi kepada masyarakat, agar lebih mudah untuk diketahui oleh publik. Para pegawai dan Pemimpin sudah dapat bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan, sangat bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya masing-masing. Hambatan dalam Analisis peran bagian humas dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ialah kurangnya sarana dan prasarana serta belum menjalankan peran bagian humas secara maksimal.

Kata kunci : Peran, Humas, Meningkatkan Informasi, Masyarakat

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE PRIVATE DEPARTMENT IN IMPROVING INFORMATION TO THE COMMUNITY AT THE SECRETARIAT OF THE DPRD PROVINCE OF NORTH SUMATRA.

This study aims to determine the analysis of the role of the Public Relations Section in Improving Information to the Public at the Secretariat of the DPRD of North Sumatra Province. The problem in this research is that the government's public relations department has not carried out the role of the public relations department optimally and the facilities are not all available in the public relations section of equipment. This study uses a qualitative descriptive research method. This study uses the theory of public relations roles according to Broom&Dozie, 1995 namely: expert presciber, communication fasilisator, Problem Solving Process Fasilisator, and communication technician. The informants in this study were the Head of the General and Civil Service Sub-Section, and the Public Relations Staff. Data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study indicate that the role of the Public Relations Section in Improving Information to the Community at the Secretariat of the DPRD of North Sumatra Province is very good, every time there is a problem Employees play a role in finding solutions in solving any problems that occur, staff employees are always on time in doing and completing tasks regarding activities - Activities of Council Members, Receiving and conveying information needed by the public through the website, social media and Must have good communication as well to provide or improve information to the public, so that it is easier for the public to know. Employees and leaders have been able to work together well in completing any given work, and are very responsible for their respective duties and functions. The obstacle in analyzing the role of the public relations department in increasing information to the public at the DPRD Secretariat of North Sumatra Province is the lack of facilities and infrastructure and has not carried out the role of the public relations department optimally.

Keywords: Role, Public relations, Improve information, Society

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Restraint Just SKB Baene, anak dari Donazanolo Baene dan Muliati Gaurifa. Lahir di Nias pada 22 Sempember 1999. Penulis merupakan anak ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara.

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri No. 074065 Balaekha Hilisimaetano Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Lahusa, Kabupaten Nias Selatan kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 2 Lahusa Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2018 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada Masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Effiati Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Walid Mustafa Sembiring S. Sos, M.IP selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Beltahmamero Simamora, S. IP, MPA selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Riri Rezeki Hariani, S,Sos M.AP selaku Sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dan saudara saya Salven Baene dan Nurmei Baene yang terus memberikan dukungan motivasi, memenuhi segala keperluan materi dan mendoakan saya untuk sampai dititik ini, dan untuk semua jeri payah orang tua saya untuk mencapai cita-cita.
7. Seluruh dosen program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Seluruh pegawai Bagian Humas dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
9. Kerabat sekaligus sahabat saya Renawati Buulolo dan Ana Risky Rolita Pasaribu yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dalam penelitian dilapangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Medan, Oktober 2022

Penulis

Restraint Just SKB Baene
188520155

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep dan Teori Peran	8
2.1.1 Jenis -jenis Peran	9
2.2 Konsep dan Teori Humas	10
2.2.1 Peran Humas	12
2.2.2 Bagian Humas.....	15
2.2.3 Tujuan Humas.....	16
2.2.4 Fungsi Humas	18
2.2.5 Fungsi Humas Pemerintah	19
2.2.6 Bentuk Humas.....	19
2.2.7 Sasaran/Khalayak Humas	21
2.2.8 Media Hubungan Masyarakat.....	23
2.2.9 Hubungan Masyarakat Dalam Pemerintahan	25
2.3 Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia .	26
2.3.1 Peningkatan Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Di Daerah.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu.....	29
2.5 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Informan Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
4.1.2 Sejarah Sekretariat DPRD Sumatera Utara	43
4.1.3. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	46
4.1.4. Fraksi DPRD Sumatera Utara.....	47

4.1.5 Komisi yang ada di DPRD Sumatera Utara.....	50
4.1.6 Alat Kelengkapan DPRD.....	50
4.1.7 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	51
4.1.8 Profil Bagian Humas Di Kantor DPRD Provinsi Sumut.....	53
4.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Humas	54
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Penasehat ahli (Expert presciber)	56
4.2.2 Fasilitator Komunikasi (communication fasilitator).....	59
4.2.3 Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Fasilitator)	61
4.2.4 Teknisi Komunikasi (communication technician).....	64
4.3 Faktor Pendukung Peran Bagian Humas Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat	67
4.4 Faktor Penghambat Peran Bagian Humas Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Masyarakat	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	51
Gambar 4.2 Staf Bagian Humas.....	52



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rencana Penelitian.....	35
-----------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kehidupan sosial sudah berada di era digital dan sudah memasuki *era post-digital* dimana informasi bisa diakses melalui berbagai media dan tidak ada batasan. Sehingga dalam perkembangan teknologi dan masyarakat yang begitu maju, media merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi (Goenawan, 2008). Keberadaan *publik relationsofficer* (PRO) saat ini tidak bisa sekedar mengerjakan siaran pers, *monitoring* media cetak, dan menjaga citra perusahaan saja, akan tetapi dituntut lebih lebih dari itu semua. Humas sebagai jembatan penghubung informasi agar informasi dengan publiknya memiliki kemampuan untuk dapat menyampaikan isi pesan organisasi yang diinginkan.

Humas merupakan salah satu bidang terpenting dalam pemerintahan legislatif yang sama sekali tidak dapat dipisahkan keberfungsian pada kinerja DPRD. Pernyataan ini di perkuat dengan beberapa fungsi Humas DPRD antara lain penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. (<https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/tupoksi> diakses pada 12 Oktober 2021).

Setiap kantor pemerintahan mempunyai kebutuhan akan tenaga terampil di bidang komunikasi dan bidang terkait lainnya untuk menangani berbagai macam permasalahan yang berkaitan antara pemerintahan sendiri tetap terjaga dengan baik dimata rakyat. Untuk itulah kantor-kantor pemerintahan sekarang ini

membutuhkan praktisi *public relations* atau humas sebagai mediator antara pemerintahan dengan rakyat, pemerintah dengan bawahan begitu juga sebaliknya agar terjalin komunikasi dan penyampaian informasi yang benar tanpa terputus di tengah jalan sehingga terjadilah kesinambungan dalam setiap hal.

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting di zaman sekarang ini, dengan terjalinnya komunikasi yang baik dari rakyat kepada pemerintah secara tidak langsung telah dapat memberikan jalan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Biasanya peran tersebut di serahkan kepada pihak humas yang berarti hal terpenting bagi seorang humas adalah kemampuannya dalam melaksanakan hubungan komunikasi baik kedalam maupun keluar, maksudnya adalah upaya pembinaan hubungan yang baik dan harmonis antara rakyat dengan wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil rakyat dengan pemimpin rakyat atau sebaliknya. Melalui kemampuan seorang humas, diharapkan juga untuk menjembatani atau Membangun hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat luar sebagai publiknya.

Karena posisinya yang sangat strategis. Maka dari bidang humas perlu diprioritaskan dalam lembaga, karena apabila tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh lembaga, maka lembaga akan mengalami ketertinggalan di era yang penuh persaingan seperti sekarang ini terutama dalam bidang perolehan dan penyampaian informasi untuk kepentingan lembaga itu sendiri.

Apalagi sekarang masyarakat membutuhkan adanya keterbukaan dalam bidang informasi dari sebuah lembaga, dengan adanya humas tentu akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat awan yang menganggap humas hanya mengadakan penampilan luar mata. Untuk menjadi seorang humas tidak hanya mementingkan penampilan fisik semata akan tetapi hal yang paling penting adalah seorang humas mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik serta pandai bergaul. Selain itu juga masih banyaknya masyarakat yang menyederhanakan tugas-tugas humas dalam menjalankan fungsinya.

Apalagi sekarang tugas humas sudah semakin kompleks, humas tidak hanya berperan untuk membentuk citra lembasga saja akan tetapi juga mempunyai tugas sebagai komunikator bagi masyarakat eksternal maupun internal. Misalnya untuk eksternal, humas harus dapat menjadi *information center* atau sumber informasi bagi masyarakat yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung bagi lembaga maupun instansi selain itu juga menjalin hubungan yang baik antara lembaga dengan pihak eksternal.

Sedangkan tugas humas untuk intern adalah membina hubungan baik antara pegawai dengan atasan atau sebaliknya bahkan antara sesama karyawan selain itu seorang humas juga harus menganalisis serta mempersiapkan langkah antisipasi apabila nantinya terjadinya krisis dalam lembaga. Dengan begitu, adanya humas dalam sebuah lembaga, akan memperlancar jalannya interaksi serta pemberian informasi dari lembaga kepada masyarakat. Selain itu, seorang humas harus bisa menciptakan ketertarikan dan penerimaan masyarakat mengenai informasi yang diberikan dari lembaga.

Dengan begitu, adanya humas dalam sebuah lembaga, akan memperlancar jalannya interaksi serta pemberian informasi dari lembaga

kemasyarakat. Selain itu seorang humas harus bisa menciptakan ketertarikan dan penerimaan masyarakat mengenai informasi yang diberikan dari lembaga. Sehingga hubungan antar lembaga dan masyarakatnya bisa berjalan baik dan lancar.

Apalagi setiap lembaga pasti mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai visi dan misi lembaga yang telah ditetapkan. Seberapa besar keberhasilannya, tergantung pada kemampuan pengelola lembaga itu sendiri terutama tugas humas dalam menjalankan tugasnya.

Mengingat pentingnya fungsi dan tugas-tugas humas maka tidak hanya lembaga swasta saja yang memerlukan peran seorang humas akan tetapi juga pada lembaga pemerintahan, karena adanya suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat baik itu internal maupun eksternal memberi tugas kepada Subbag Inmas dan Humas (Sub Bagian Informasi Masyarakat dan Humas) yang mana bertugas melaksanakan pelayanan kehumasan yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi, pembentukan citra menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan hubungan masyarakat.

Humas mempunyai tugas melaksanakan hubungan kemitraan dengan media yang terkait dengan kehumasan, menyiapkan bahan dan fasilitas jumpa

pers berkaitan dengan kebijakan, melaksanakan pengelolaan berita dalam website, melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi agenda atau aktivitas anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan kegiatan penyusunan agenda, dan melaksanakan klasifikasi pengelolaan hasil pencermatan berita.

Selanjutnya, peran *public relations* yang lebih dikenal dengan sebutan humas di dalam kantor pemerintahan, humas selaku mediator antara atasan dengan bawahan baik internal maupun eksternal, humas sebagai pihak yang menjembatani keluar masuknya informasi antara pihak dalam dan pihak luar,

humas yang bertanggung jawab tentang apa saja informasi yang perlu diketahui dengan baik dan benar oleh masyarakat tentang kebijakan-kebijakan baru atau kegiatan-kegiatan dewan yang sudah dilakukan tanpa menimbulkan adanya kesalah pahaman penerimaan antara masyarakat dengan kantor pemerintah itu sendiri.

Disinilah kemahiran atau keprofesionalan peran humas atau *public relations* dalam menyampaikan informasi-informasi tersebut dengan benar sangatlah diharapkan. Seorang *public relations* atau humas di setiap lembaga atau instansi atau individu atau pemerintahan diharuskan juga membentuk suatu citra yang baik dalam keberadaanya di masyarakat, karena pembentukan citra yang baik ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena dengan citra yang baik diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap apayang telah menjadi informasi yang disampaikan dapat terbentuk.

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesenjangan diakibatkan tidak sesuainya apayang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hal ini terbukti berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas bahwa bagaimana peran kehumasan DPRD agar dapat menjaga citra DPRD Sumut dengan baik dan menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya. Kenyataan ini menjadi perhatian khusus untuk peneliti. Oleh sebab itu peneliti mengangkat judul “Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kepada masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara” untuk menjadi sebuah solusi pemerintah dalam mengatasi masalah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Peran Bagian Humas Dalam Menigkatkan Informasi Kepada masyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kemasyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk Mengetahui Analisis Peran Bagian humas Dalam Meningkatkan Informasi Kemasyarakat Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

- 2) Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Tentang Analisis Peran Bagian humas Dalam Meningkatkan Informasi Kemasyarakatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan mampu menerapkan teori-teori yang digunakan pada penulisan penelitian ini sebagai referensi bagi para pembaca.
2. Bagi kelembagaan, penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi penelitian sosial tentang Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kemasyarakatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara bagi Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Universitas Medan Area.
3. Bagi masyarakat umum, khususnya masyarakat kota Medan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan tentang Analisis Peran Bagian Humas Dalam Meningkatkan Informasi Kemasyarakatan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran di definisikan sebagai sebuah aktivitas yang di perankan atau di mainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut *terminology* adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang di harapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus

bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media online terutama pada media yang penulis teliti yaitu *sripoku.com*, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

2.1.1 Jenis -jenis Peran

peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu perang.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kiita dalam menjalankan peran tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

2.2 Konsep dan Teori Humas

Humas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada suatu organisasi atau lembaga guna mempromosikan, memperkenalkan, membangun citra positif, dan menampung segala aspirasi masyarakat.

Hubungan masyarakat atau humas, dalam istilah umum sering pula disebut dengan istilah bahasa Inggris yaitu "*public relations*". Oleh karena itu humas memiliki arti yang sama dengan *public relations*.

Hubungan Masyarakat menurut definisi Frank Jefkins yang diterjemahkan oleh Daniel Yadin dalam buku yang berjudul *Public Relations* (2003:10) adalah "semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian." Hubungan ke dalam adalah hubungan antara seluruh komponen yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga. Hubungan keluar adalah hubungan yang dibina dengan orang-orang diluar organisasi.

Selanjutnya menurut *The British Institute of Public Relations (IPR)* dalam Rachmadi F. (1992: 18) humas atau *public relations* adalah: *Public relations practice is the deliberate, planned and sustained effort to establish and mutual*

understanding betweenan organization and its public. Artinya : upaya yang sungguh-sungguh, terencana, dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian antara organisasi dengan publiknya. Sedangkan menurut Oemi Abdurrahman (1993: 26) *public relations* adalah “suatu kegiatan untuk menanamkan dan memperoleh pengertian, *good-will*, kepercayaan, penghargaan, pada dan dari publik suatu badan khususnya dan masyarakat umum”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat di simpulkan bahwa humas adalah segenap kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang, baik komunikasi ke dalam maupun keluar secara berkesinambungan guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Menurut Scott M. Cutlip dalam Ruslan (2010:25) *public relations* adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi demi kepentingann publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya.

Pada dasarnya, humas merupakan bidang atau fungsi tertentu yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang nonkomersial. Kebutuhanan kehadirannya tidak bisa dicegah, terlepas dari kita menyukainya atau tidak, karena humas merupakan salah satu yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif. Menurut Frank Jefkins, Humas adalah semua bentuk

komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.

2.2.1 Peran Humas

Peranan humas dalam suatu organisasi atau lembaga adalah memasarkan menginformasikan terkait kegiatan, program-program kerja yang terdapat dalam organisasi atau lembaga agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Humas juga berperan menerima serta menganalisis kritik dan saran dari masyarakat luas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi atau lembaga tersebut. Kritik dan saran yang diterima oleh praktisi humas kemudian dianalisis dan didiskusikan dengan pimpinan. Diskusi dengan pimpinan penting dilakukan agar terdapat solusi yang tepat dari kritik dan saran dari masyarakat tersebut.

Peranan humas atau *public relations* dalam organisasi ada empat kategori menurut Dozier & Broom, 1995 (Rosady Ruslan, 2012: 20), yaitu :

1. Penasehat Ahli (*Expert presciber*)

Petugas PR dianggap sebagai orang yang ahli. Tugasnya menasehati pimpinan perusahaan atau organisasi. Seorang praktisi pakar *publicrelations* yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencari solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (*public relationship*). Hubungan praktisi pakar *public relations* dengan manajemen organisasi seperti hubungan antara manager dan bawahannya. Artinya, pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai apayang telah disarankan atau usulan dari

pakar *public relations* (*exper prescriber*) tersebut dalam memecahkan dan mengatasi persoalan *public relations* yang tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.

2. Fasilitator Komunikasi (*communication fasilitator*)

Peranan humas sebagai fasilitator komunikasi antara perusahaan dengan publik. Baik dengan publik eksternal maupun internal. Dalam hal ini, praktisi *public relations* bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Di pihak lain, dia juga mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak lainnya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta saling memahami, mempercayai, menghargai, mendukung dan penuh toleransi dari kedua belah pihak.

3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (*Problem Solving Process Fasilitator*). Peranan petugas humas sebagai fasilitator dalam proses pemecahan masalah. Pada peranan ini petugas humas melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen. Peranan praktisi *public relations* dalam proses pemecahan persoalan *public relations* ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik sebagai penasehat (*adviser*) hingga mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah di hadapi secara rasional dan profesional.

4. Teknisi Komunikasi (*communication technician*)

Peranan teknisi komunikasi ini menjadikan praktisi *public relations* sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan *methode of communication in organization*.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, humas berpusat pada komunikasi. Praktisi humas harus mempunyai keterampilan komunikasi yang baik. Lancar tidaknya kegiatan humas khususnya sangat bergantung pada komunikasi. Dengan komunikasi, kita terutama humas dapat menciptakan persamaan pengertian mengenai informasi, ide, pemikiran, dan sikap terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan terciptanya persamaan serta pengertian mengenai pesan tertentu.

Menurut Rosady Ruslan (2005: 10) terdapat empat peran utama humas, yaitu:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung.
2. Membina *relationship*/hubungan.
3. Peranan *backup management*.
4. Membentuk *corporate image*

Peran humas secara umum adalah:

1. Membangun reputasi perusahaan dan organisasi
2. Membangun reputasi individu sebagai seseorang yang ahli di bidangnya
3. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap produk atau jasa dan organisasi yang tersedia
4. Meningkatkan kredibilitas dari posisi publik atau kelayakan suatu organisasi

5. Meningkatkan kampanye yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2.2 Bagian Humas

Ada beberapa bagian humas dan pengkajiannya adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian humas dan publikasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang humas dan publikasi, meliputi : pelaksanaan kegiatan kehumasan, hubungan antar lembaga dan publikasi.
2. Sub bagian protokol dan aspirasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang protokol dan aspirasi, meliputi : menyiapkan pelayanan kegiatan keprotokolan dan penyerapan aspirasi masyarakat.
3. Sub bagian pengkajian dan pengembangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang pengkajian terhadap produk hukum, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli serta penyelenggaraan perpustakaan.

Menurut Gaziyan, ada beberapa bagian humas pemerintah yang efektif ialah seorang humas yang dapat:

1. Memberikan informasi pada masyarakat tentang kegiatan sehari-hari, program, dan kegiatan-kegiatan tertentu pemerintah daerah.
2. Menyiapkan brosur dan materi informasi lainnya.
3. Membangunn dan memelihara kontak dengan media pusat, regional, dan local.

4. Membantu konferensi pers dan media lainnya bagi kegiatan-kegiatan terkait.
5. Menyediakan komunikasi internal yang efektif dibalai kota.
6. Mengatur pertemuan pimpinan dan staf pemerintah daerah lainnya dengan publik.
7. Mengatur penampilan ditelevisi dengan pimpinan dan staf pemerintah daerah.
8. Menyiapkan dan melakukan kampanye bagian Humas untuk televisi, pers, dan radio.
9. Melakukan survei kepuasan warga dan melaporkan hasilnya kepada dewan lokal dan pimpinan pusat.
10. Meninjau komentar, keluhan dan saran masyarakat dan melaporkan tren atau fenomena yang disampaikan masyarakat.
11. Menetapkan kontak yang akan bermanfaat bagi masyarakat dengan kelompok-kelompok yang berbeda dari dalam dan luar kota.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa humas di pemerintahan menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri.

2.2.3 Tujuan Humas

Tujuan humas adalah menciptakan citra positif masyarakat terhadap organisasi atau lembaga, agar masyarakat percaya bahwa organisasi atau lembaga tersebut merupakan organisasi atau lembaga yang memberikan manfaat untuk masyarakat,

terutama masyarakat disekitar organisasi tersebut berdiri. Adapun tujuan humas menurut Frida Kusumastuti (2002: 20-21) adalah :

1. Terpeliharanya dan terbentuknya saling pengertian (Aspek Kognisi)
Tujuan humas adalah membuat publik dan organisasi/lembaga saling mengenal. Baik mengenal kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Dengan demikian, aktivitas kehumasan haruslah menunjukkan adanya usaha komunikasi untuk mencapai saling kenal dan saling mengerti.
2. Menjaga dan membentuk saling percaya (Aspek Afeksi) Sikap saling percaya keberadaannya masih bersifat tersembunyi, yakni ada pada keyakinan seseorang (publik) terhadap kebaikan/ketulusan orang lain (organisasi/lembaga) dan juga pada keyakinan organisasi/lembaga terhadap kebaikan/ketulusan publiknya.
3. Memelihara dan menciptakan kerjasama (Aspek Psikomotoris) bantuan dan kerjasama sudah dalam bentuk perilaku atau termanifestasikan dalam bentuk tindakan tertentu. Aspek psikomotoris dapat dilihat dari usaha humas sebagai wakil organisasi/lembaga untuk senantiasa terbuka
4. terhadap pers yang menginginkan fakta, tidak mempersulit kerja pers dalam mendapat informasi dan menghubungi sumber berita.

Oemi Abdurrahman (1993: 34) menjelaskan bahwa tujuan humas atau *public relations* diantaranya adalah

Mengembangkan good-will dan memperoleh opini publik yang

Favorable atau menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang

harmonis dengan publik, kegiatan *public relations* harus dikerahkan

kedalam (internal) dan keluar (eksternal).

2.2.4 Fungsi Humas

Humas atau hubungan masyarakat dalam pemerintahan memegang peranan yang sangat penting. Begitu banyak peran atau fungsi humas dalam pemerintahan sehingga diperlukan orang-orang yang berkompeten untuk menjalankan fungsi humas ini.

Renald Kasali, (Rosady Ruslan, 2012: 36) menjelaskan bahwa fungsi *public relations* atau manajemen humas adalah fungsi manajemen humas yang bertujuan menciptakan dan mengembangkan persepsi terbaik bagi suatu lembaga, organisasi, perusahaan atau produknya terhadap segmen masyarakat, yang kegiatannya langsung atau pun tidak langsung mempunyai dampak bagi masa depan organisasi, lembaga, perusahaan dan produknya. Maksud dari pendapat Renald Kasali tersebut adalah bahwa humas mempunyai fungsi dalam menciptakan persepsi atau kesan baik dari masyarakat yang berhubungan langsung atau yang memberikan dampak bagi masa depan organisasi atau lembaga itu sendiri.

Menurut Edward L. Bernay (Rosady Ruslan,2012: 18) menyebutkan terdapat tiga fungsi utama humas, yaitu :

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau

sebaliknya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa fungsi humas adalah mampu menjadi komunikator dan mediator untuk anggota dalam sebuah perusahaan, organisasi atau lembaga maupun untuk masyarakat luas. Menampung segala aspirasi masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga. Humas juga berfungsi menciptakan citra yang baik atau positif dalam masyarakat.

2.2.5 Fungsi Humas Pemerintah

1. Memperkenalkan program pemerintah
2. Menyampaikan informasi kemasyarakat
3. Sebagai mediator dengan instansi lain
4. Menjaga nama baik lembaga
5. Menciptakan iklim yang kondusif
6. Agen pembentuk opini *public*
7. Mengemas agenda setting
8. Membangun kepercayaan *public*
9. Membangun citra pemerintah
10. Menyusun strategi komunikasi efektif
11. Menerima informasi dari masyarakat
12. Mengawasi pendapat masyarakat

2.2.6 Bentuk Humas

Humas dalam organisasi atau lembaga tidak hanya hubungan antara praktisi humas dalam organisasi kepada masyarakat luas, namun juga kepada

seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Hal tersebut biasa disebutkan dengan humas internal. Oemi Aburrachman (1993: 34) membagi hubungan masyarakat ke dalam dua bentuk yaitu :

1. *Internal Public Relations* adalah hubungan antara anggota, karyawan, dan pimpinan dalam sebuah instansi. *Internal public relations* yang baik adalah yang memperlakukan tiap karyawan dengan sikap yang sama.
2. *External Public Relations* adalah hubungan instansi dengan orang-orang yang berada diluar instansi tersebut hingga terbentuk opini public yang *favorable* terhadap instansi tersebut.

Selanjutnya, di jelaskan kegiatan humas eksternal dan kegiatan humas internal oleh Suryosubroto B. (1988: 163) sebagai berikut:

1. Kegiatan Eksternal
 - a. Secara langsung (tatap muka)
 - b. Secara tidak langsung (melalui media)
2. Kegiatan Internal
 - a. Secara langsung (tatap muka)
 - b. Secara tidak langsung (melalui media tertentu)

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa bentuk-bentuk hubungan masyarakat ada 2 (dua) macam, yaitu hubungan internal humas dan eksternal humas. Internal humas merupakan hubungan dengan anggota dalam organisasi atau lembaga tersebut. Eksternal humas merupakan hubungan dengan masyarakat luas, seperti organisasi atau lembaga lain, masyarakat sekitar organisasi atau lembaga, pemerintah, dan lain-lain.

2.2.7 Sasaran/Khalayak Humas

Khalayak atau public adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Sasaran atau khalayak humas pada suatu perusahaan, organisasi atau lembaga harus disesuaikan dengan bidang dalam perusahaan, organisasi atau lembaga tersebut.

Pada lembaga pendidikan, sasaran atau khalayak hubungan masyarakat adalah seperti masyarakat luas, orangtua wali murid, dunia usaha/dunia industry, dan pemerintah. Penetapan sasaran atau khalayak hubungan masyarakat terdapat berbagai alasan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Frank Jefkins yang diterjemahkan oleh Haris Munandar (1992: 75), yakni:

1. Untuk mengidentifikasi segmen khalayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan.
2. Untuk menciptakan skala prioritas, sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya.
3. Untuk memilih media dan teknik kehumasan yang sekiranya paling sesuai, serta
4. Untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah di terima.

Berdasarkan pendapat diatas, maka tujuan di tetapkannya sasaran/khalayak publik adalah untuk menentukan khalayak manakah yang

tepat untuk dijadikan sasaran dalam organisasi atau lembaga tersebut. Kemudian untuk menetapkan skala prioritas, terkait dengan adanya anggaran dan sumberdaya lainnya. Serta untuk memilih media apakah yang tepat digunakan oleh humas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut Rosady Ruslan (2005: 33) yang menjadi khalayak sasarannya secara umum adalah:

1. Kelompok yang berkepentingan seperti pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (*government relations*).
2. Masyarakat sekitar atau tertentu (*community relations*)
3. Kelompok pemakai produk atau pelanggan (*customer and consumer relations*)
4. Badan lembaga swadaya masyarakat (*consumer bodies*)
5. Kelompok sebagai penekan (*pressure group*)
6. Kelompok pemuka agama dan masyarakat (*opinion leader*)
7. *Trade association* atau asosiasi perdagangan dan profesi yang merupakan *industrial relations*.
8. Kelompok *business relations* atau kelompok relasi bisnis.
9. Kelompok internal (*internal relations*) dan pemilik perusahaan (*stock holder*). Sesuai dengan pendapat di atas bahwa penentuan sasaran atau khalayak humas ditentukan berdasarkan pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau lembaga tersebut.

Menurut Rachmadi F.(1992: 13) ada dua macam *public* (khalayak) yang menjadi tujuan, yaitu:

1. Publik Intern adalah publik yang menjadi bagian dari unit usaha/badan/perusahaan/instansi itu sendiri.
2. Publik Ekstern adalah “orang luar” atau publik umum (masyarakat) di mana industri atau usaha itu berada, yang harus diberi penerangan atau informasi demi tumbuhnya *goodwill* dari mereka.

2.2.8 Media Hubungan Masyarakat

Media hubungan masyarakat merupakan alat yang digunakan dalam upaya membangun komunikasi dengan masyarakat. Media hubungan masyarakat sangat diperlukan. Media diperlukan agar anggota internal anggota maupun masyarakat luas dapat dengan mudah menyampaikan gagasan pendapat atau kritik dan saran untuk organisasi atau lembaga. Rachmadi F. (1992: 87) menjelaskan tentang media komunikasi yang digunakan oleh organisasi humas meliputi:

1. Media berita (*news media*)
2. Media siaran (*broadcast media*)
3. Media komunikasi tatap muka atau komunikasi tradisional.

Praktisi humas menggunakan media sebagai alat untuk menjalankan fungsi-fungsi kehumasannya, yang terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. *Print* atau media cetak terdiri dari surat kabar (*newspapers*), majalah (*magazine*), publikasi (*trade publications*) serta *inhouse publications*.
2. *Electronic* atau media elektronik terdiri dari televisi, radio dan lain-lain.
3. *New Agencies* atau jaringan berita yang terdiri dari jaringan nasional dan internasional.

Humas memiliki dua jenis media, yaitu media internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek adalah sebuah media internal yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Media Internal yang biasa digunakan oleh Humas, antara lain:

1. Jurnal Internal
2. Papan Pengumuman
3. Kaset Video dan CCTV
4. Stasiun Radio
5. Jasa Penyampaian Berita dan Ide Lewat Telepon
6. Kotak Sara
7. Rangsangan Berbicara
8. Siaran Umum (*Public Address Broadcast*)
9. Obrolan langsung
10. Dewan dan Komite Pekerja
11. Presentasi Video atau Slide
12. Literatur Pengenalan
13. Konferensi Staf dan Pertemuan Dinas
14. Kunjungan oleh Pihak Manajemen
15. Kunjungan Staf
16. Acara-acara Kekeluargaan
17. Pameran dan Peragaan
18. Klub-klub Sosial.

2.2.9 Hubungan Masyarakat Dalam Pemerintahan

Hubungan Masyarakat (Humas) yang ada di dalam kantor pemerintahan berbeda dengan humas yang ada di kantor atau perusahaan swasta, di dalam kantor pemerintahan humas tidak memiliki sesuatu yang dijual belikan. Meskipun demikian humas didalam kantor pemerintahan dalam penggunaan tehnik untuk menjalankan tugasnya tidak terlalu jauh berbeda dengan humas yang ada dikantor atau perusahaan swasta yakni menggunakan teknik periklanan dan publisitas, dimana keduanya digunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat atau khalayak ramai akan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan instansi yang bersangkutan.

Ada pendapat tentang *public relations* atau humas dipemerintahan, oleh Oemi Abdurrachman, M.A dalam bukunya *dasar-dasar Public Relations* (2001:113).

“Seorang PRO diinstansi atau lembaga pemerintahan tidak dapat ikut serta dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dan ia harus mengikuti garis yang sudah ditentukan, kecuali bila didalam bagian organisasi, *public relations* itu ditempatkan sedemikian rupa, sehingga ia selalu akan mengetahui keputusan yang diambil dan sebab-sebabnya sebelum diumumkan”

Humas di dalam pemerintahan perlu diterapkan dan dikembangkan luaskan secara professional dikarenakan tugas pemerintah sangatlah berat, dimana menetapkan program-program yang ditujukan untuk masyarakat sedang masyarakat yang dihadapi terdiri dari berbagai publik dengan kepentingan yang kompleks, dan semuanya tidak terlepas dari karakteristik yang telah melekat

didalam setiap program atau kegiatan pemerintah (Frida Kusumastuti,2002: 38), yakni antara lain:

1. Program pemerintah ditujukan untuk masyarakat luas. Dengan berbagai latar belakang, karakter, ekonomi, pendidikan (*intelegensi*) yang beragam.
2. Hasil yang didapat seringkali abstrak, yang sulit dilihat dalam jangka waktu dekat, dan jangka waktu panjang karena sifatnya yang integral dan berkesinambungan, melibatkan generasi kegenerasi.
3. Program pemerintah selalu mendapat pengawasan dari berbagai kalangan, terutama media, lembaga swadaya masyarakat, dan lain- lain.

Dalam hal seperti inilah perlunya diadakan pendekatan khusus untuk smelibatkan partisipasi dan emansipasi masyarakat.

2.3 Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Didalam membahas masalah kedudukan dan fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan di Indonesiaini selalu menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi nasional, agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta di dalam upaya meningkatkan kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diemban tidak keluar dari relnya sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini.

Dalam hubungan inilah maka peneliti mengajak pembaca untuk mendalami kembali bunyi jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya yang dapat peneliti petik intisari amanatnya, bahwa:

1. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat daerah otonom maupun yang bersifat administratif belaka.
2. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah di tetapkan melalui undang-undang dengan restriksi bahwa bentuk dan susunan itu tidak akan menjelmakan “Negara dalam negara”.
3. Pemerintah daerah harus di selenggarakan dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan, seperti dasar dalam sistem pemerintah negara.
4. Hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa wajib diperhatikan.
5. Didaerah-daerah yang bersifat otonom, harus di bentuk Badan-badan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengaktualisasikan sendi dan dasar permusyawaratan dalam pemerintahan daerah.

Dari sini nampak jelas, bahwa para pendiri republik kita telah menumpahkan perhatian yang sangat besar terhadap bentuk susunan pemerintahan daerah seperti yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar, termasuk bentuk dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keberadaan DPRD dipandang penting agar pemerintahan daerah dapat dibangun dan dilaksanakan atas dasar permusyawaratan (demokrasi).

2.3.1 Peningkatan Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam Sistem Pemerintahan Di Daerah

Efektivitas dan demokratisasi pemerintahan merupakan gagasan-gagasan yang sering dikemukakan dalam pengkajian desentralisasi pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu dianggap lebih efektif melalui asas desentralisasi, karena lebih menjamin keserasian dan kecepatan tindakan pemerintah dalam keadaan-keadaan yang bersifat khusus yang terjadi di daerah. Upaya meningkatkan efektivitas dan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah cita-cita yang sudah lama kita upayakan perwujudannya. Seperangkat ketentuan tentang pemerintahan di daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, selain DPRD berkedudukan sebagai unsur pemerintah daerah juga berfungsi sebagai wakil rakyat. Karena anggota-anggota lembaga ini dipilih, maka para anggota itu adalah wakil rakyat, dan DPRD sendiri adalah sebuah badan perwakilan. Dalam kedudukan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan fungsinya. Kemampuan DPRD melaksanakan fungsi perwakilannya dapat dilihat dari daya persepsi para anggotanya dalam mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan kata lain, kemampuan DPRD melakukan agresi dan artikulasi kepentingan dari rakyat yang diwakili merupakan ukuran atas kualitas penyelenggaraan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Pasal 30 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa salah satu kewajiban DPRD adalah memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.

Secara umum, fungsi-fungsi badan perwakilan berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi keuangan, dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

Upaya meningkatkan fungsi dan peranan DPRD sebagai mitra Kepala Daerah, pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta wakil rakyat, bukanlah merupakan hal yang sederhana. Ia terkait dengan berbagai faktor yang terdapat baik di dalam maupun di luar DPRD itu sendiri.

Kenyataan bahwa hingga dewasa ini DPRD masih terbatas kemampuannya, bukan saja dalam mengembangkan diri sebagai lembaga politik daerah yang bermakna, yang mampu menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, tetapi juga terbatas di dalam melaksanakan hak-hak para anggotanya.

Keadaan ini mengharuskan adanya langkah-langkah yang lebih konkrit untuk lebih mengembangkan fungsi-fungsi DPRD, menata institusi-institusi yang ada dalam DPRD, memantapkan sistem pemerintahan daerah, dan meningkatkan kualitas anggota DPRD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan untuk menemukan inspirasi baru serta memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bahan

kajian pada penelitian peneliti, berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Penelitian atas nama Ridwan Fawzi yang diambil dari <https://dspace.uui.ac.id>, berjudul “Analisis Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Menjalankan Aktivitas Media Relations”. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti bisa mengetahui berbagai kondisi atau fenomena dan situasi yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti rumuskan tentang peran dan fungsi humas pemerintah kota Balikpapan dan menjalankan aktivitas media *relations*.
2. Penelitian atas nama Isti Puput Susanti dengan judul “Peran Humas Pemerintah Daerah Dalam Media Internal”. Penelitian ini diambil dari <https://www.academia.edu>. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan juga sekunder. Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini peran Humas Pemerintah Daerah dalam media internal (studi deskriptif kualitatif pada bulletin Jogjawara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dapat di simpulkan sebagai berikut, bahwa dari 4 peranan humas dalam suatu organisasi diantaranya Penasihat Ahli, Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Proses Pemecahan Masalah dan Teknisi Komunikasi memiliki peranan penting dalam media internal, dari keempat variable diatas 4 variabel diatas, menjelaskan bahwa

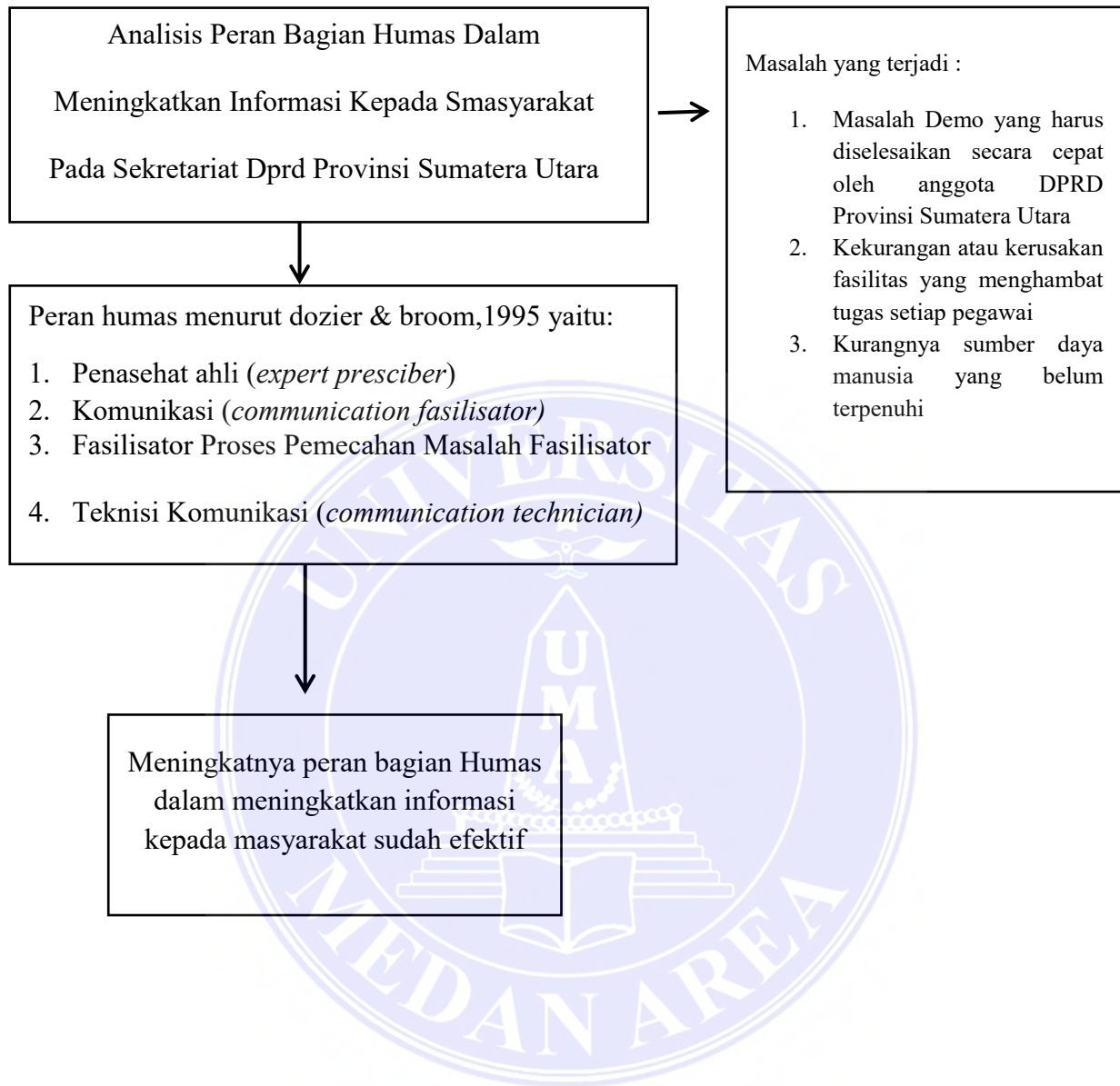
HumasPemda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan dalam media internal bulletin Jogjawara.

3. Penelitian Tika Oktavianingsih di Universitas Indonesia yang berjudul Peran Humas Lembaga Negara Dalam Menjaga Reputasi Organisasi. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi peran Humas DPR RI dalam menjaga reputasi kinerja anggota DPR RI dan mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi Humas DPR dalam menjaga reputasi kinerja anggota dewan.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Menurut Uma Sekarung (dalam Sugiyono, 2017: 60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Suriasumantri (dalam Sugiyono, 2017: 60), kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono dalam bukunya *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, menyatakan bahwa penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran yang dikutip oleh. (Sugiyono, 2010: 9). Menurut Wardi Bachtiar seperti dikutip A Don Nasrullah J, metode berasal dari bahasa Inggris *method* yang artinya cara, yaitu cara untuk mencapai tujuan.

Metode penelitian berarti prosedur pencarian data, meliputi penentuan populasi, sampling penjelasan konsep dan pengukurannya, cara-cara pengumpulan data dan teknik analisisnya (Jamaludin, 2011: 54). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2010: 15).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrument inti. Dalam hal ini, peneliti banyak menghabiskan waktu di daerah penelitian untuk mengamati dan memahami masalah secara mendalam. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar dari pada data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan proses dari pada produk.

Menurut Rahmat Kriyantono dalam buku teknik praktis riset komunikasi mengatakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya, tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Metode ini cenderung menganalisis data secara induktif.

Peneliti mengumpulkan data atau bukti-bukti bukan untuk membuktikan hipotesis yang telah peneliti miliki sebelum melaksanakan penelitian. Melainkan untuk mengembangkan teori-teori berdasarkan hal-hal khusus yang berhasil di temukan dan di kumpulkan dari lapangan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan proses dari pada produk, sehingga lebih banyak mempertanyakan bagaimana mengapa dari pada apa (Zamroni, 1992:81-82). Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa metode penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam hal ini, penulis mendeskripsikan masalah-masalah yang ditemukan dengan apa adanya. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih (Irawan Soeharto, 2008:35).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan Sumatera Utara. Jl. Imam Bonjol No.5, Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan peneliti melakukan penelitian mulai dari bulan Januari 2022 sampai bulan Febru2022.

Tabel 3.1 Rencana Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Juli 2022	Sept 2022
1	Pengajuan Judul								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Data Penelitian								
5	Seminar Hasil								
6	Perbaikan Skripsi								

7	Sidang									
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal (2016: 139) Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Dalam penentuan informasi peneliti menggunakan teknik purposik sampling. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Menurut Afrizal (2016:139) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Humas yaitu: Bapak M. Sofyan Tanjung.

b. Informan Utama

Menurut Afrizal (2016:139) Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Pegawai Kehumasan yaitu: Ibu Nurul, Bapak Affan M. Ritonga, dan Bapak M. Roihan.

c. Informan Tambahan

Menurut Afrizal (2016:139) Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan

pembahasan dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Staf Pegawai Kantor DPRD Sumut yaitu: Bapak Gaffur dan Ibu Ayu.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

1. Pengamatan (Observasi)

Yang dimaksud dengan observasi dalam metode penelitian adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk memahami, mencari jawaban, dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian, benda, maupun simbol-simbol tertentu. Teknik observasi peneliti lakukan untuk pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki, hal ini dilakukan untuk menjaga orisinalitas dan akurasi data yang diperoleh dilapangan.

Observasi ini peneliti gunakan untuk mengamati proses kegiatan humas dan apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawab pada bagian/divisi humas DPRD Provinsi SumateraUtara.

2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Metode wawancara mendalam adalah sama seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. Sesuatu yang amat berbeda dengan metode wawancara lainnya adalah bahwa wawancara

mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian. Wawancara mendalam sangat dibutuhkan dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian analisis komunikasi ini melibatkan manusia sebagai pelaku atau aktor (subyek) dalam proses pembentukan karakter yang menjadi realitas yang akan diteliti.

Menurut Rachmat Kriyanto (2007:99) wawancara mendalam adalah “suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung atau bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam”.

Mendukung keterangan di atas, Rachmat Kriyanto (2007:99) menyatakan bahwa: Peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden, responden bisa disebut juga informan. Dalam hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasi, nilai-nilai maupun pengalaman-pengalaman.

Moleong, (2013:186) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian, karena penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi ini peneliti

lakukan untuk memperoleh data dari catatan- catatan, arsip-arsip, yang berhubungan dengan penelitian.

4. Triagulasi

Triaguasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan – perbedaan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triagulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandigkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dengan demikian, terdapat triagulasi sumber, triagulasi teknik, dan triagulasi waktu, yaitu:

a. Triagulasi Sumber

Triagulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber.

b. Triagulasi Teknik

Triagulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Trigulasi Waktu

Pengecekan kredibilitas dengan wawancara, atau tekknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015:336) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan.

Menurut Sugiyono (2015:336) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman.

- a. Pengumpulan Data (*Data Collection*) merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.
- b. Reduksi Data (*Data Reduction*) merupakan tahapan untuk merakum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

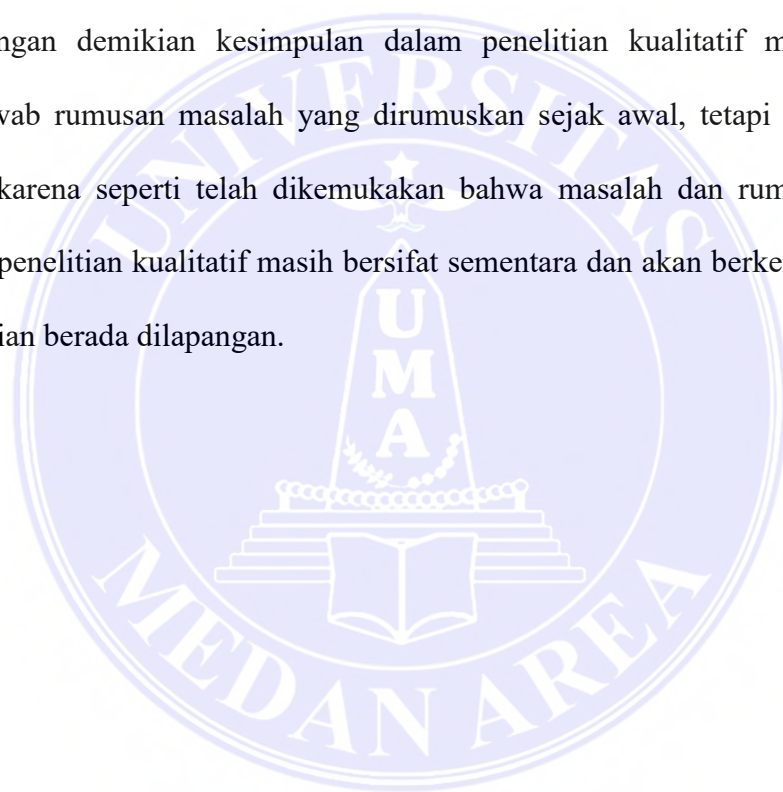
Tahap reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- c. Penyajian Data (*Data Display*) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan teori yang digunakan peneliti dalam mengukur kualitas peran bagian Humas DPRD Sumatera Utara ada empat kategori antara lain yaitu, Penasehat Ahli, Fasilitator Komunikasi, Fasilitator Proses Pemecahan Masalah, Teknisi Komunikasi. Dari keempat teori tersebut sangat penting dibagian pemerintahan khususnya bagian humas, peran itulah yang meningkatkan informasi atau suatu pesan kepada masyarakat, melalui website, facebook, dan Instagram DPRD Sumut. Humas merupakan salah satu bidang terpenting yang sama sekali tidak dapat dipisahkan keberfungsian pada kinerja DPRD.
2. Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam analisis peran bagian humas dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat pada sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara: salah satu faktor pendukungnya yaitu adanya saling kerjasama antara staf dengan pemimpin supaya terlaksananya kinerja yang lebih baik dan mungkin didukung juga dengan biaya administrasi yang diperlukan, sedangkan faktor penghambatnya salah satunya tentang alat-alat yang ada

di humas hanya adanya kerusakan computer, ruangan yang kurang memadai, serta kurangnya sumberdaya manusia yang belum terpenuhi.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis peran bagian humas dalam meningkatkan informasi kepada masyarakat pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu ditingkatkan kedisiplinan dan lebih fokus terhadap tugasnya dengan baik agar kinerja bagian humas lebih efektif lagi.
- b. Perlu disediakannya sumber daya manusia dan fasilitas agar penyelesaian tugas semakin lancar, pemenuhan fasilitas yang tersedia untuk administrasi bagian Humas serta adanya kemudahan dalam pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

Dozier & Broom, 1995, dalam Ruslan, Rosady, *Manajemen Public Relations & Media komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Effendy. 2004. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek: Proses Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Jefkins, Frank dan Daniel Yadin. 2003. *Public Relations* Jakarta: Erlangga

Frida Kusumastuti. 2002. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mulyana, Deddy. 2001. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Oemi Abdurrachman. 1995. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Intrans Publishing

Rachmadi F. 1992. *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Silih Agung Wasesa Jm Macnamara. 2017. *Strategi Publik Relations*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber Lainnya :

Andi Sutra, 2016. Peran Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Diambil Dari Skripsi eprints.radenfatah.ac.id

Esti CahyaNingshi, 2015. Peran Humas Dalam Membangun Citra dan Mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo Kulon Progo. Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta

Putri Meysa Nabila Fauzziya, Aat Ruchiat Nugraha.2019. “Pengelolaan Acara “Bandung Lautan Sepeda” Oleh Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat” dalam Hubungan Masyarakat: Jurnal Scriptura volume 9 (59-70). Bandung: Universitas Padjadjaran.

Ridwan Fawzi, 2018. Analisis Dan Peran Fungsi Humas Pemerintah Balikpapan Dalam Menjalankan Media Relations.Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia

Sarah Treny S, 2019. Pelaksanaan Fungsi Kehumasan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.Medan:Universitas Sumatera Utara

Tika Oktavianingsi, 2012. Peran Humas Lembaga Negara Dalam Menjaga Reputasi Organisasi. Depok:Universitas Indonesia

Sumber Internet:

DPRD SUMUT. 2020. Tugas Pokok dan Fungsi.<https://dprd-sumutprov.go.id/index.php/tupoksi> Diakses Pada 12 Oktober 2021

DPRD JATENG. 2019. Bagian Humas.<https://dpr.jatengprov.go.id> Diambil Pada 10 November 2021 Diakses Pada 31 Januari 2021

Isti Puput Susanti. 2012. Peran Humas Pemerintah Daerah Dalam Media Internal.<https://www.academia.edu> Diakses Pada 12 Oktober 2021

Sarah Treny S. 2019. Pelaksanaan Fungsi Kehumasan Pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera utara. [https:// repository.usu.ac.id](https://repository.usu.ac.id) Diakses Pada 12 Oktober 2021

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian



Kantor DPRD Sumatera Utara

(Kamis, 10 Februari 2022, pukul 10.00 wib)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Access From 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Lampiran 2 :



Foto bersama Bapak M. Sofyan Tanjung Kepala Sub Bagian Humas, sebagai informan utama. (Kamis, 10 Februari 2022, pukul 10.00 wib).

Lampiran 3 :



Foto bersama Ibu Nurul Sebagai Staf Ahli dibagian Humas, sebagai informan kunci. . (Kamis, 10 Februari 2022, pukul 14.00 wib).

Lampiran 4 :



Foto Bersama Bapak Gafur sebagai staf PNS Bagian Administrasi, sebagai informan tambahan. (Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 14.00 wib).

Lampiran 5 :



Foto Bersama Ibu Ayu Nadia Nasution pegawai Honorer di bagian Humas, sebagai informan tambahan. . (Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 16.00 wib).

DATA INFORMAN

1. Informan kunci

Nama : M. Sofyan Tanjung, S.SOS

Jenis kelamin : Laki – laki

Usia : 51 Tahun

Jabatan : Kasubbag Humas

2. Informan Utama

Nama : Nurul Fajar Samosir, SE

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 29 Tahun

Jabatan : Staf Ahli bagian Humas

Nama : Affan M. Ritonga, ST

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 30 Tahun

Jabatan : Staf bagian kepegawaian

Nama : Muhammad Roihan, SE

Jenis kelamin : Laki-laki

Usia : 28 Tahun

Jabatan : Staf bagian kepegawaian

3. Informan tambahan

Nama : T. Abdul Gafur, S.SOS

Jenis kelamin : Laki – laki

Usia : 39 Tahun

Jabatan : Staf pegawai PNS Bagian Administrasi Humas

Nama : Ayuni Nadiah Nasution, SE

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 24 Tahun

Jabatan : Staf pegawai Honorar

